

Jurnal Teknik PWK Volume 3 Nomor 2 2014

Online : <http://ejournal-sl.undip.ac.id/index.php/pwk>

KAJIAN PEMBANGUNAN KAWASAN TERTINGGAL DI KABUPATEN GROBOGAN

Eva Artmey Mangedaby¹ dan Agung Sugiri²

¹Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

²Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
email : mangedabymey@yahoo.co.id

Abstrak: Kawasan tertinggal adalah suatu kawasan permukiman penduduk dengan segala kegiatan sosial, budaya dan ekonominya yang terletak baik dikawasan buddidaya maupun dikawasan lindung dengan tingkat pertumbuhan atau perkembangan suatu aspek kehidupannya lebih rendah atau tertinggal dibandingkan kawasan permukiman lainnya. Kabupaten Grobogan merupakan Kabupaten Dati II Jawa Tengah yang secara konstelatif berdekatan dengan jalur regional dimana hal itu didukung dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Grobogan. Permasalahan yang dimiliki yaitu kondisi aksesibilitas, ketersediaan sarana prasarana, serta perluasan kesempatan kerja. Sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk memberikan rekomendasi arahan pembangunan yang ada di Kabupaten Grobogan dan sasaran yang ingin dicapai adalah teridentifikasinya aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana, kesempatan perluasan kerja serta perumusan arahan pengembangan yang ada di Kabupaten Grobogan dengan cara mereview kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yang meliputi analisis aksesilitas, analisis sarana prasarana, analisis kesempatan kerja serta analisis kebijakan. Hasil dari penelitian ini adalah arahan rekomendasi untuk pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mengetaskan kawasan tertinggal yang ada di Kabupaten Grobogan. Dengan rekomendasi ini diharapkan Kabupaten Grobogan tidak lagi menjadi kawasan tertinggal

Kata Kunci : Kawasan Tertinggal, Kemiskinan, Pembangunan Wilayah

A Study on The Development of Disadvantaged Areas in Grobogan Regency

Abstract: A disadvantaged area is an inhabited area with all social, cultural and economic activities of the inhabitants in a larger functional region; however, their quality of life is lower or lagged behind the other areas in the region, indicated especially with higher incidence of poverty. Grobogan is one of the regencies (kabupaten) in Central Java that has considerable numbers of disadvantaged areas, although they are supported by the potentials of Grobogan. Problems are indicated, that the conditions of accessibility, availability of infrastructure and expansion of employment opportunities in the areas are lagged behind those of the others. The aim of the study is to provide recommendations on the development guidelines for Grobogan and the objectives to be achieved are the identifications of accesbility, availability of infrastructure, expansion of employment opportunity and the reformulation of development strategies by way of reviewing the Regency's existing policies. To achieve the aim and objectives, this study has used quantitative methods. The analysis is quantitativte descriptive analysis covering accessibility analysis, infrastructure analysis, analysis of employment opportunities as well as policy analysis. The recommendations resulted from this study are for the local

government and the related public and private sectors to alleviate the disadvantaged areas in Grobogan, so that better regional development is expected to happen.

Keywords: Disadvantaged Areas, Poverty, Regional Development

PENDAHULUAN

Pada era otonomi daerah, pembangunan ekonomi menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam daerah maupun faktor eksternal, seperti masalah kesenjangan dan isu global. Isu global ini menuntut tiap daerah untuk mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kesenjangan dan globalisasi berimplikasi kepada propinsi dan kabupaten/kota, untuk melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi daerah secara terfokus melalui pengembangan kawasan dan produk andalan. Percepatan pembangunan ini bertujuan agar daerah tidak tertinggal dalam persaingan pasar bebas, seraya tetap memperhatikan masalah pengurangan kesenjangan. Karena itu seluruh pelaku memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan keterkaitan antar sektor, antar program, antar pelaku, dan antar daerah (Bappenas, 2006).

Pelaksanaan pembangunan yang mengacu kepada pembangunan perkotaan menyebabkan munculnya kawasan-kawasan tertinggal yang diakibatkan oleh tidak meratanya pembangunan. Padahal sekitar 45 persen dari total penduduk Indonesia (220 Juta jiwa) yaitu sebanyak 99 juta jiwa bermukim di kawasan yang relatif kurang berkembang, yang mempunyai mata pencaharian utama pada sektor pertanian dalam arti luas.

Pembangunan kawasan tertinggal merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat secara berkelanjutan berdasarkan pada potensi dan kemampuan kawasan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan kawasan tertinggal seharusnya mengacu kepada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri, maju, sejahtera serta berkeadilan.

Pelaksanaan pembangunan yang dicapai telah menghasilkan berbagai kemajuan meskipun masih terdapat berbagai kendala yang mendesak untuk diselesaikan. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat didorong oleh sektor pertanian yang terus bertumbuh meskipun diperhadapkan pada beberapa permasalahan seperti; ketersediaan sarana dan prasarana, masih rendahnya akses petani terhadap sumber daya produksi. Sementara masih terdapat ketidakseimbangan tingkat pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, masih adanya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang illegal, belum optimalnya pengembangan perikanan budidaya dll.

Kualitas sumber daya manusia menunjukkan peningkatan yang dapat dilihat dari peningkatan kualitas dan mutu pendidikan, meskipun masih belum meratanya sebaran pendidikan baik secara kuantitas maupun kualitas serta tingkat kesejahteraan pendidik yang belum sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup bagi mereka yang berada pada wilayah-wilayah tertentu serta belum tersedianya pelayanan pendidikan dasar secara cuma-cuma. Dalam bidang kesehatan, derajat kesehatan dan status gizi masyarakat yang membaik, yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan angka kurang gizi pada balita. Meskipun masih dibutuhkannya tenaga kesehatan disetiap wilayah agar terjadi keseimbangan pelayanan kesehatan. Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat meningkat, hal ini terbukti dengan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak dalam pembangunan terus diberikan perhatian yang utama baik dalam konteks sosial, pendidikan, kesehatan serta keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan publik lainnya dan membangun anak yang

sehat, cerdas, ceria, bertqwa dan terlindungi. Pemahaman dan penghayatan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat sangat dominan menjadikan kehidupan kerukunan antar umat beragama yang sangat kondusif yang diaktualisasikan dalam perilaku hidup sehari-hari secara harmonisasi dalam kehidupan sosial di dalam masyarakat.

Ketertinggalan tingkat kemajuan wilayah pedesaan. Hal ini juga disebabkan oleh masih rendahnya produktivitas dan kualitas petani dan pertanian, terbatasnya akses petani terhadap sumber daya permodalan, serta rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perdesaan. Akibatnya kesejahteraan masyarakat diperdesaan, yang mencakup sekitar 60 persen penduduk Indonesia. Khususnya petani masih sangat rendah tercermin dari jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin yang lebih besar dibandingkan perkotaan.

Dari kondisi yang sudah ada menimbulkan pertanyaan penelitian yaitu ***:"Bagaimana meningkatkan efektifitas penanganan kawasan tertinggal di Kabupaten Grobogan?"***

Hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Grobogan untuk lebih meningkatkan penanganan untuk mengatasipermasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi.

KAJIAN LITERATUR

A. Kawasan Tertinggal

1. Definisi Kawasan Tertinggal

Bappenas mendefinisikan kawasan tertinggal sebagai kawasan yang mempunyai kondisi yang relatif rendah dalam bidang sosial, ekonomi, kesejahteraan, serta kemajuan pembangunan disbanding dengan daerah lain (Bappenas dalam Wahyudi, 2002). Sedangkan pengertian kawasan tertinggal secara umum adalah kawasan yang mempunyai kondisi relative lebih rendah dalam beberapa bidang sosial, ekonomi, kesejahteraan serta kemajuan pembangunan dibandingkan dengan daerah lain.

2. Penyebab Ketertinggalan Kawasan

penyebab ketertinggalan wilayah adalah keadaan geografisnya yang relatif sulit

dijangkau karena letaknya yang jauh dipedalaman, perbukitan/pegunungan, atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi. Sumber daya alam yang beberapa daerah tertinggal tidak mempunyai potensi sumber daya alam, Sumber daya manusia yang pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang. Sarana dan prasarana yang terbatas menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal mengalami kesulitan untuk melakukan aktifitas ekonomi dan sosial.

3. Strategi Penanganan

Strategi yang dipakai adalah Pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kapasitas serta peningkatan mitigasi, dan rehabilitasi.

4. Peran Stakeholders

Peran stakeholders adalah dengan cara meningkatkan kemandirian masyarakat, pengoptimalaan pemanfaatan potensi wilayah, memperkuat integrasi ekonomi antar daerah, dan peningkatan penanganan daerah khusus yang memiliki karakteristik keterisolasian

B. IDT (Inpres Desa Tertinggal)

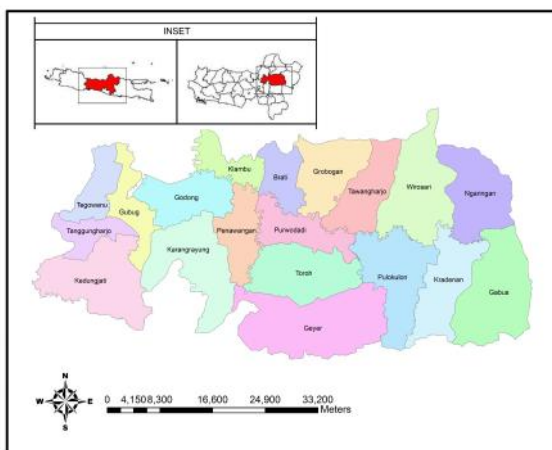
Inpres Desa Tertinggal merupakan alternative cara yang lain, IDT diperlukan untuk meningkatkan penanganan kemiskinan secara berkelanjutan di desa-desa tertinggal. IDT merupakan program khusus yang telah ada di pedesaan atau perkotaan, oleh karena itu diharapkan agar IDT dapat dipadukan dengan baik dengan program-program sektoral.

C. Teknik Perencanaan Pembangunan Pedesaan

Jenis perencanaan yang dapat diterapkan oleh pengambil kebijakan dalam perencanaan pembangunan wilayah pedesaan yaitu meliputi: Kriteria investasi, neraca wilayah, program linera, analisis input output, biaya terendah, analisis kompleks industri, analisis biaya manfaat serta analisis sistem.

HASIL PEMBAHASAN

Kabupaten Grobogan, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukota kabupaten berada di Purwodadi. Tepatnya di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi. Secara geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara 110°15' BT – 111°25' BT dan 7° LS - 7°30' LS dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran di bagian tengahnya. Wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara dua pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur, dan berbatasan dengan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Demak. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kudus, Pati dan Blora. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Blora. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Kabupaten Semarang. Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 Kecamatan dan 280 Desa/Kelurahan, 1451 Dusun, 1753 RW, 9.017 RT. Jumlah Desa terbanyak dimiliki oleh Kecamatan Godong yaitu 28 Desa, sedangkan yang paling sedikit dimiliki oleh Kecamatan Brati, Klambu, dan Tanggunharjo yaitu sebanyak 9 Desa. Jumlah perangkat desa di Kabupaten Grobogan adalah sebanyak 3075 orang dengan Ibukota berada di Purwodadi.



Sumber: Bappeda Kab. Grobogan, 2014

GAMBAR 1
PETA ADMINISTRASI
KABUPATEN GROBOGAN

Analisis Kajian Pembangunan Kawasan Tertinggal di Kabupaten Grobogan

A. Analisis Aksesibilitas

Sebagian besar kecamatan di Kabupaten Grobogan berada di kondisi kurang baik, hanya ada 1 kecamatan yang berada di kondisi baik yaitu Kecamatan Purwodadi, sedangkan kecamatan yang berada di kondisi buruk adalah Kecamatan Kedungjati dan Kecamatan Klambu. Skor dari penjumlahan ketersediaan transportasi di Kabupaten Grobogan adalah 37 dengan artian buruk, karena jauh dari angkutan umum dan sehingga tidak bisa dijangkau.



Sumber: Survey Peneliti, 2014

GAMBAR 2
KONDISI JALAN DI KABUPATEN GROBOGAN

B. Analisis Sarana Prasarana

1. Sarana Pendidikan

Kekurangan jumlah sarana pendidikan masih cukup banyak, walaupun demikian masih ada beberapa kecamatan yang memiliki sarana pendidikan lebih dari kebutuhan, kecamatan yang memiliki sarana pendidikan yang lenih dari kebutuhan saat ini adalah Kecamatan Kedungjati, Geyer, Brati, Klambu, Gubug, Tegowanu dan Tanggunharjo. Dalam kondisi eksisting sebagian besar kondisi sarana pendidikan tersebut tidak layak untuk digunakan.



Sumber: Survey Peneliti, 2014

GAMBAR 3
KONDISI SARANA PENDIDIKAN DI KABUPATEN GROBOGAN

2. Sarana Kesehatan

Kecamatan yang memiliki skor sarana kesehatan tertinggi adalah Kecamatan Kedungjati, Penawangan, Toroh, dan Purwodadi. Pengambilan skor didasarkan pada jumlah sarana kesehatan eksisting dan kebutuhan sarana kesehatan dimasa kini. Kecamatan yang memiliki skor tertinggi artinya sudah sarana kesehatan sudah menjangkau semua masyarakat.



Sumber: Survey Peneliti, 2014

GAMBAR 4
KONDISI SARANA KESEHATAN DI KABUPATEN GROBOGAN

3. Sarana Peribadatan

Jumlah sarana peribadatan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan untuk sarana peribadatan seiring dengan bertambahnya penduduk yang ada di Kabupaten Grobogan. Tetapi untuk tahun 2008 dan 2009 jumlahnya sama dan tidak mengalami kenaikan yaitu sebanyak 7.745 buah dan hal ini terjadi juga pada tahun 2010 dan 2011 yang tidak mengalami kenaikan.



Sumber: Survey Peneliti, 2014

GAMBAR 4
KONDISI SARANA PERIBADATAN DI KABUPATEN GROBOGAN

4. Sarana Perdagangan dan Jasa

Kecamatan yang memiliki jumlah sarana perdagangan dan jasa yang lengkap yaitu hanya Kecamatan Purwodadi, Godong dan Gubug, sedangkan sebagian besar

kecamatan memiliki sarana perdagangan dan jasa yang kurang lengkap. Kecamatan Toroh, Geyer, Brati, Klambu, Tegowanu dan Tanggunharjo justru memiliki sarana perdagangan dan jasa yang tidak lengkap.



Sumber: Survey Peneliti, 2014

GAMBAR 5
KONDISI SARANA PERDAGANGAN DAN JASA DI KABUPATEN GROBOGAN

5. Persampahan

Jumlah prasarana persampahan seperti tong, gerobak, transfer dan dump truck tiap tahunnya akan mengalami kenaikan. Diharapkan pada tahun 2018 prasarana persampahan sudah tersebar di seluruh pelosok desa di Kabupaten Grobogan untuk mengurangi kebiasaan masyarakat yang membuang sampah disungai. Saat ini masyarakat yang terdapat di desa terpencil untuk mengatasi permasalahan sampah masih dengan membakarnya, mengubur dan membuang ke sungai. Maka dari itu pada tahun mendatang permasalahan sampah di Kabupaten Grobogan diharapkan sudah bisa teratasi dengan tersedianya tong, grobak atau dump truck sampah seiring dengan meningkatnya jumlah TPS dan TPA di Kabupaten Grobogan.



Sumber: Survey Peneliti, 2014

GAMBAR 6
KONDISI PRASARANA PERSAMPAHAN DI KABUPATEN GROBOGAN

6. Telepon

Bahwa jumlah prasarana telepon umum dari tahun ke tahun akan mengalami penurunan, sama halnya dengan penggunaan telepon rumah. Hal ini diakibatkan karena sebagian besar masyarakat sudah menggunakan telepon genggam, jadi pemerintah tidak memfokuskan prasarana telepon umum atau telepon rumah lagi, akan halnya pemerintah akan memfokuskan kepada sarana prasarana yang lain. Masyarakat yang tinggal di desa tertinggal juga sudah dapat menjangkau komunikasi melalui telepon genggam.



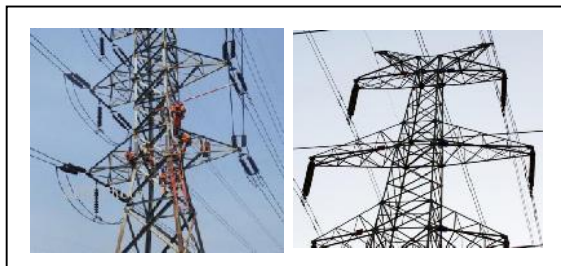
Sumber: Survey Peneliti, 2014

GAMBAR 7

**KONDISI PRASARANA TELEPON
DI KABUPATEN GROBOGAN**

7. Listrik

Jumlah pelanggan listrik dari tahun 2007-2018 mengalami kenaikan seiring bertambahnya kebutuhan listrik masyarakat Kabupaten Grobogan. Sampai tahun ini kebutuhan listrik di Kabupaten Grobogan sudah menjangkau ke seluruh pelosok desa. Itu artinya untuk tahun-tahun mendatang sudah tidak ada yang dikhawatirkan lagi dalam kebutuhan listrik pemerintah hanya perlu meningkatkan pelayanan listrik saja.



Sumber: Survey Peneliti, 2014

GAMBAR 8

**KONDISI PRASARANA LISTRIK
DI KABUPATEN GROBOGAN**

8. Air Bersih

Kebutuhan air di Kabupaten Grobogan skor paling banyak yaitu Kecamatan Purwodadi, Brati dan Godong, karena 3 kecamatan tersebut memiliki jumlah pelanggan air terbanyak. Kebanyakan sebagian masyarakat di Kabupaten Grobogan masih memanfaatkan sungai sebagai kebutuhan air mereka. Diharapkan pada tahun 2018 seluruh masyarakat Kabupaten Grobogan sudah menggunakan air dari PDAM untuk kebutuhan mereka.



Sumber: Survey Peneliti, 2014

GAMBAR 9

**KONDISI PRASARANA AIR BERSIH
DI KABUPATEN GROBOGAN**

C. Analisis Perluasan Kesempatan Kerja

Dari hasil analisis kesempatan kerja maka didapatkan kesimpulan bahwa skor terbanyak berada di Kecamatan Karangrayung, Toroh, Pulokulon, Wirosari, Grobogan, Purwodadi, dan Gubug. Skor tersebut adalah hasil dari variabel banyaknya industri di kecamatan tersebut serta jumlah pencari kerja yang sedikit dan juga tingkat pendidikan masyarakat. Diharapkan pada tahun 2018 segala permasalahan pencari kerja sudah teratasi sehingga angka pengangguran di Kabupaten Grobogan akan berkurang.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di atas maka didapatkan hasil berupa kecamatan mana saja yang termasuk kategori tertinggal dan mana yang tidak. Kecamatan yang masuk dalam kategori tidak tertinggal adalah Kecamatan Purwodadi, Godong dan Gubug. Sedangkan untuk kategori tertinggal adalah Kecamatan Penawangan, Pulokulon, Brati, dan Tanggunharjo. Sedangkan kecamatan yang termasuk dalam kategori agak tertinggal adalah Kecamatan Kedungjati, Karangrayung, Toroh, Geyer, Kradenan, gabus,

Ngaringan, Wirosari, tawangharjo, Grobogan dan Tegowanu.

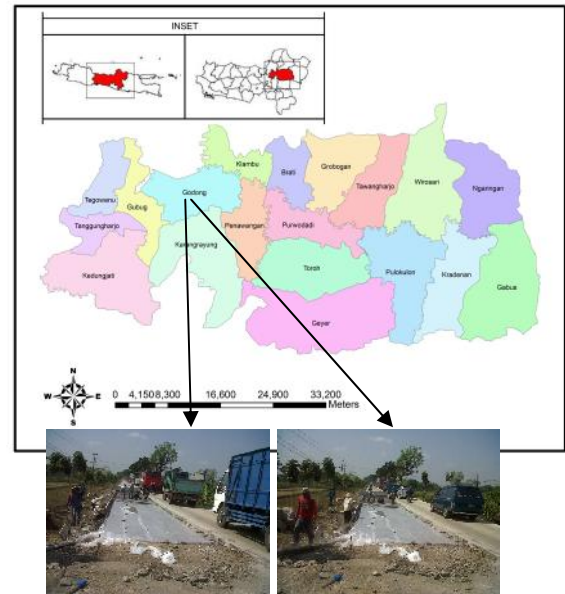
Kradenan, Pulokulon, Penawangan, Karangrayung, Godong, Gubug dan Tanggunharjo.

D. Analisis Kebijakan

Dari RTRW Kabupaten Grobogan 2011-2031 aksesibilitas di Kabupaten Grobogan: Sebagaimana disebutkan dalam RTRW Kabupaten Grobogan 2011-2013 bahwa rencana peningkatan jalan kolektor primer pada Kecamatan Purwodadi yang merupakan pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Grobogan. Sedangkan untuk angkutan perdesaan yang melayani penumpang antar kecamatan di dalam wilayah Kabupaten Grobogan meliputi; Purwodadi ke desa-desa seperti Wirosari, Sulursari, Gubug, Godong, Karangrayung, Purwodadi, Pulokulon, Klambu, Tegalrejo, Simo, Bago, Ngaringan, dan Kedungombo. Sampai tahun 2014 jalur untuk angkutan penumpang belum sepenuhnya melayani masyarakat yang berada di kawasan tertinggal, akses ke terminal yang telah disebutkan masih sangatlah susah untuk dijangkau, maka dari itu sebagian besar masyarakat yang berada di desa tertinggal masih mengandalkan kendaraan pribadi untuk menjangkanya.

Sebagaimana disebutkan dalam RTRW Kabupaten Grobogan tahun 2011-2031 bahwa rencana sistem jaringan telekomunikasi melalui telepon kabel disemua kawasan perkotaan dan peningkatan kapasitas Sentra Telepon Otomat (STO) yang terdapat di Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Toroh, Kecamatan Godong dan Kecamatan Gubug. Tetapi pada kenyataannya sampai tahun 2014 jaringan telekomunikasi melalui telepon kabel hanya menjangkau di kawasan perkotaan saja. Walaupun masyarakat yang ada di desa tertinggal sudah menggunakan telepon genggam untuk komunikasi nya.

Sedangkan untuk rencana pengembangan gardu induk distribusi akan ditingkatkan di Kecamatan Purwodadi. Sedangkan untuk rencana pengembangan jaringan tranmisi tenaga listrik SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) dengan kapasitas 500 kVA meliputi: Kecamatan Purwodadi, Toroh, Geyer, Gabus, Ngaringan,



Sumber: Analisis Penyusun, 2014

GAMBAR 10
KONDISI PRASARANA AIR BERSIH
DI KABUPATEN GROBOGAN

KESIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kawasan tertinggal yang ada di Kabupaten Grobogan dari 19 kecamatan maka yang termasuk kawasan tertinggal meliputi Kecamatan Penawangan, Brati, Pulokulon, Klambu dan Tanggunharjo sedangkan untuk kawasan tidak tertinggal adalah Kecamatan Purwodadi, Godong dan Gubug, selain itu sisanya termasuk dalam katagori kawasan agak tertinggal. Jumlah kecamatan tertinggal ini sudah berkurang dari Tahun 2007 yang mencapai 6 kecamatan tertinggal dan 1 kecamatan sangat tertinggal. Pada Tahun 2012 pemerintah sudah berhasil meningkatkan 2 kecamatan yang termasuk dalam kecamatan tertinggal ke kecamatan agak tertinggal yaitu Kecamatan Kedungjati dan Kecamatan Tawangharjo, selain itu Kecamatan Klambu yang pada Tahun 2007 merupakan kecamatan sangat tertinggal kini di tahun ini sudah menjadi kawasan tertinggal.

Namun demikian pada tahun 2033 semua kecamatan harus sudah menjadi kecamatan yang tidak tertinggal sesuai dengan target pemerintah pada RTRW Kabupaten Grobogan 2011-2033.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan maka di dapatkan hasil skoring dari masing-masing kecamatan yang sebelumnya telah diidentifikasi terlebih dahulu, untuk perluasan kesempatan kerja memang pada tahun 2033 pemerintah sendiri mentargetkan 80% penduduk di Kabupaten Grobogan mempunyai mata pencaharian dan hal ini akan mengurangi angka pengangguran yang terjadi di Kabupaten Grobogan itu sendiri. Kemudian untuk aksesibilitas dan sarana prasarana ada beberapa kecamatan yang pada tahun 2007 masuk katagori tertinggal tetapi pada tahun 2012 sudah masuk dalam katagori agak tertinggal, seperti perdagangan dan jasa yang jumlah penambahan sarana nya semakin banyak dari tahun 2007. Kemudian untuk sarana kesehatan jangkauan pelayanan sudah mulai ditingkatkan walaupun belum sampai ke desa-desa di kecamatan tertinggal. Untuk prasarana seperti air bersih memang sebagian masyarakat desa di kecamatan tertinggal masih memanfaatkan sungai sebagai pasokan kebutuhan air sehari-hari mereka. PDAM masih belum melayani semua desa di Kabupaten Grobogan sampai saat ini tetapi pada tahun mendatang sesuai dengan RTRW Kabupaten 2011-2033 pemerintah akan meningkatkan jangkauan pelayanannya. Untuk prasana listrik tidak ada desa yang tidak teraliri listrik itu artinya untuk prasarana listrik jangkauan pelayanan sudah masuk ke desa tertinggal. Prasarana telepon yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah telepon umum yang hanya terdapat di beberapa kecamatan yang tidak tertinggal seperti di Kecamatan Purwodadi, Gubug dan Godong.

Sedangkan untuk aksesibilitas sendiri, desa yang ada di kecamatan tertinggal masih sulit menjangkau desa pusat perdagangan dan jasa, dari tahun 2007 sampai dengan saat ini aksesibilitas di Kabupaten Grobogan masih susah untuk dijangkau, walaupun pemerintah sudah merencanakan anggaran dan melakukan perbaikan jalan tiap tahunnya tetapi karena tanah yang ada di Kabupaten

Grobogan tergolong tanah labil jadi perbaikan jalan dilakukan tiap tahunnya. Selain itu jalan utama di Kabupaten Grobogan menjadi jalan primer yang menghubungkan antar kabupaten dan sering dilalui banyak kendaraan berat. Akan tetapi dari hasil analisis kebanyakan jalan yang ada di kecamatan-kecamatan juga sebagian besar masih berupa tanah (pada tahun 2007) tetapi saat ini sudah mulai diperkeras.

Hasil trendline dari tahun 2007 sampai dengan tahun ini aksesibilitas, dan sarana prasarana sudah mulai ada peningkatan, walaupun perlu adanya pengoptimalan lagi dari pemerintah, untuk kesempatan kerja sendiri dari hasil trendline tahun 2007 sampai sekarang jumlah pencari kerja keluar daerah mulai terjadi penurunan hal ini disebabkan oleh banyaknya investor yang sudah membuka industri di Kabupaten Grobogan seiring dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Grobogan, industri-industri tersebut menyerap banyak sekali tenaga kerja dari dalam Kabupaten sendiri, sehingga Dinas Tenaga Kerja memberikan pelatihan pekerjaan yang bekerjasama dengan industri yang ada, tetapi sebagian kecil lebih memilih mencari pekerjaan di luar Kabupaten bahkan diluar negeri. Namun demikian hal ini sudah cukup mengurangi angka pengangguran yang ada di Kabupaten Grobogan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bappenas [Badan Perencanaan Nasional]. 2000. *Upaya Mengatasi Kawasan Tertinggal*. Jakarta.
- Bappenas [Badan Perencanaan Nasional]. 2000. *Upaya Mengatasi Kawasan Tertinggal*. Jakarta.
- Bappenas [Badan Perencanaan Nasional]. 2002. *Panduan Identifikasi Desa Terpencil*. Jakarta.
- Bappenas [Badan Perencanaan Nasional]. 2006. *Definisi Kawasan Tertinggal*. Jakarta.
- Bappenas, Direktorat Kewilayahan II. 2005. *Kajian Strategi dan Arah Kebijakan*

- Untuk Memaksimalkan Potensi Daya Saing Daerah*. Laporan Akhir. Jakarta.
- Bintaro. 2000. *Kaji Tindak Penanganan Kawasan IDT*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- BPS. 1994. *Penyempurnaan Metode Penentuan Desa Tertinggal*. Jakarta: BPS
- BPS [Badan Pusat Statistik]. 2012. *Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta.
- Centre for Strategic and International Studies, 2000, Analisis CSIS: *Otonomi Daerah – Penyelesaian atau Masalah*.
- Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal. 2011. *Subdit Kawasan Tertinggal*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Kepmen Bappenas No. 50 Tahun 2002 Tentang Pengembangan Kawasan Tertinggal
- Kepmen PDT No. 1 Tahun 2005 Tentang *Strategi Nasional Pembangunan Kawasan Daerah Tertinggal*
- Soetarto. 1994. *Strategi Penanganan Kawasan tertinggal*. Jakarta
- Wijaya, R. 2012. *Angka Kemiskinan Ditargetkan 4,32 Juta Jiwa*. Suara Merdeka.com, 29 Desember 2012. Diakses pada tanggal 2 Mei 2012.
- Wildani, Afi. 2013, Wawancara Bidang Infrastruktur Bappeda Kabupaten Grobogan. Grobogan